

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

**Dimaksudkan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

**SRI HARTATIK
B 200 040 203**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena pembangunan daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut

peranan Pemerintah Daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah diberbagai bidang untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Keempat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Wulandari, 2001:17) adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif, sehingga dengan demikian akan terjadi kemampuan atau kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah Desentralisasi Fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah daerah melakukan fungsinya secara efektif, maka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi hasil pajak dan bukan pajak, maupun dari subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat (Wulandari, 2001:18).

Dengan adanya otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan semakin besar sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi suatu daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah (Udjianto, 2005:59). Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari Pemerintah Pusat (Udjianto, 2005:60).

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di sisi lain dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah menurut (Yuliati, 2001:22) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Disisi lain sangat disadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda, karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam, tingkat ekonomi dan karakteristik sosial budaya (Udjianto, 2005:60).

Anita Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang Kemampuan Keuangan Daerah di kota Jambi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Fadillah (2004), melakukan penelitian tentang Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten

Wonogiri. Hasilnya adalah Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) di Kabupaten Wonogiri baru memenuhi beberapa unsur penyusunan anggaran kinerja.

Astuti (2004), melakukan penelitian tentang Kinerja Keberhasilan Instansi Pemerintah Daerah Dilihat Dari Pendapatan Daerah Terhadap APBD Tahun 2002 Pada Karesidenan Pati. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah relatif rendah karena masih tergantung dengan Pemerintah Pusat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Karesidenan Pati dilihat dari segi keuangan belum berhasil untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri, terlihat dari rata-rata PAD dan rata-rata pendapatan pihak ekstern masih terdapat selisih jauh.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian Pemerintah Daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dan untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung turun.

Udjianto (2005), melakukan penelitian tentang Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sragen periode 1998 sampai 2002. Hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen mengalami kecenderungan meningkat, kecuali tahun anggaran 1999 dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sragen sangatlah baik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2001) tentang kemampuan keuangan daerah di kota jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Periode penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada periode 2004 – 2006, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode 1996 – 2000.

2. Obyek penelitian.

Penelitian ini mengambil obyek di Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian terdahulu mengambil obyek di kota Jambi.

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui perkembangan kemampuan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kabupaten Klaten dari tahun 2004 – 2006.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah?”

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Klaten tahun anggaran 2004-2006.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Klaten dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengurai pembahasan tentang tinjauan tentang otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), analisis rasio APBD dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang jenis penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan tentang gambaran umum Kabupaten Klaten dan hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasannya serta saran-saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.